

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN (BPK) DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat - Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Fakultas Syariah

**Oleh:**

**GUSTIAN ARI PRANOMO**

**NPM: 1521020218**

**Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I**

**: Drs. H. IRWANTONI, M.Hum**

**Pembimbing II**

**: H. ROHMAT, S.Ag., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. untuk melakukan tugasnya BPK diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tahun 2001 terjadi Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 BPK dapat membentuk Badan Perwakilan pada setiap Provinsi di Indonesia guna meningkatkan ruang lingkup kerja dalam mengawasi aparat atau instansi negara BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung memiliki tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara di daerah. Dalam hukum Islam korupsi bisa disebut *risywah*, *risywah* adalah memberikan sesuatu dalam rangka memperlancar usaha maupun itu dalam bentuk *bathil*/salah atau menyalahkan yang benar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung dalam mencegah tindak pidana korupsi ?. (2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam mencegah tindak pidana korupsi ?. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam memeriksa keuangan daerah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang peran BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen, serta karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya di analisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam pencegahan tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara di daerah, hal ini perlu dilakukan agar tidak adanya perilaku korupsi di pemerintahan Provinsi Lampung. Ditinjau dari *fiqh siyasah* ada suatu lembaga dalam ketatanegaraan Islam yang menangani korupsi yaitu *Wilayah Mazhalim*. Lembaga ini menangani sikap korup para pejabat pemerintah atas harta yang mereka pungut dari rakyat.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suraimin. Telp. (0721) 704030, Sukarame 1 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM**  
**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi**  
**di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan**  
**Provinsi Lampung)**

**Nama : Gustian Ari Pranomo**  
**NPM : 1521020218**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum**  
**NIP. 1960102119901031000**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**  
**NIP. 197409202003121003**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H**  
**NIP. 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung)"** disusun oleh **Gustian Ari Pranomo, NPM: 1521020218**, program studi Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal **02 Januari 2020**

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Frenki, M.Si

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S. H., M.M

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Penguji II : H.Rohmat, S.Ag., M.H.I

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002



## MOTTO

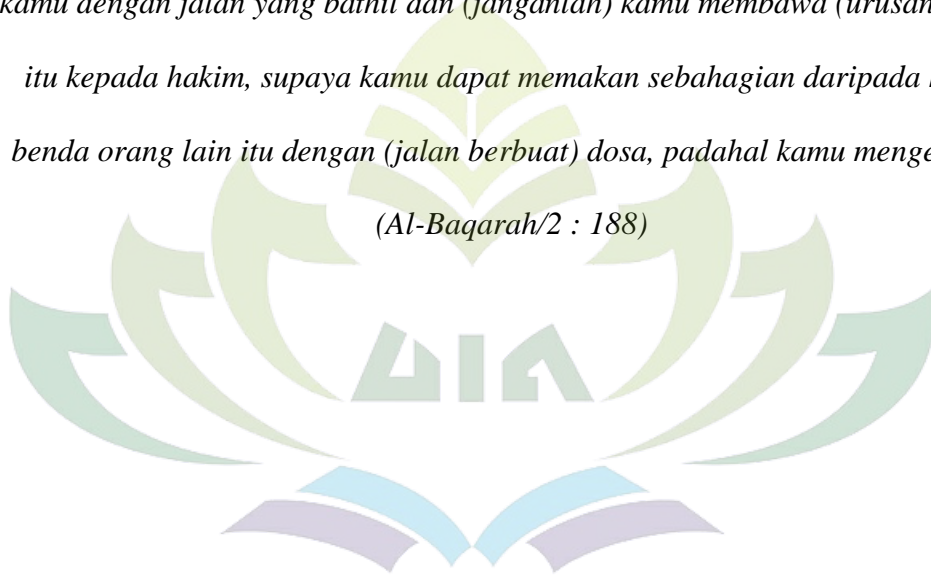
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

(البقرة : ١٨٨)

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

(Al-Baqarah/2 : 188)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil' alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT . serta Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya :

1. Orang Tua Tercinta, Ayahanda (H. Hasril Arianto) dan Ibunda (Ismawarni) yang telah memberikan kasih sayang, memberi semangat, motivasi, serta selalu berjuang dan mendoakan demi tercapainya cita-citaku.
2. Adikku Tersayang, Resti Isha Palupi yang selalu mendoakan demi keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Seluruh Keluarga Besar H. Sulthani (Alm) dan Hj. Siti Sulamah. Serta Seluruh Keluarga Besar Abdurrahman (Alm) dan Sarini. Yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

## **RIWAYAT HIDUP**

Gustian Ari Pranomo, dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 1996 di Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Ismawarni dan Ayah yang bernama H. Hasril Arianto.

Pendidikan penulis dimulai pada TK PKK Sukarame, Kecamatan Talang Padang dan selesai pada tahun 2002. kemudian melanjutkan ke SD Negeri Kebumen, Kecamatan Sumberejo dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Talang Padang dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke SMKS YPT Pringsewu selesai pada tahun 2014. Alhamdulillah pada tahun 2015 penulis dapat melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Strata 1 di Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah).

Organisasi menjadi perihal yang penting bagi penulis untuk menambah wawasan keorganisasian diluar pendidikan perkuliahan. Penulis pernah aktif di organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung)**. Shalawat beriring salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Khoiruddin, M.H. serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. dan Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Bapak Frenki, M.Si.



4. Pembimbing I Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. dan Pembimbing II Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para staf karyawan Fakultas Syariah.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung. Terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam melakukan penelitian.
8. Sahabatku EEGI+R. Egin Tafisa Putra, Effendi, S.Sos. Intan Zakiah dan Khoirini, SE. Yang telah memberi dukungan, semangat serta motivasi, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Aamin.
9. Sahabatku TWELVE. Adjie Arvindo, Ali Khoironi, Estiyana, M. Hardiansyah Kusuma, S.H, M. Saefuddin, Pratama Argo Putra, Rizki Setiawan, Wahyudi Rahmat dan Witiar Pramudita. Yang telah memberikan motivasi dan semangat serta dukungan kepada penulis, semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamin.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2015, khususnya kelas D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaanya, canda dan tawa selama ini.
11. Kawan-kawan KKN 152 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kenangan selama KKN.

12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobal a'lam.

Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis,

Gustian Ari Pranomo  
NPM. 1521020218

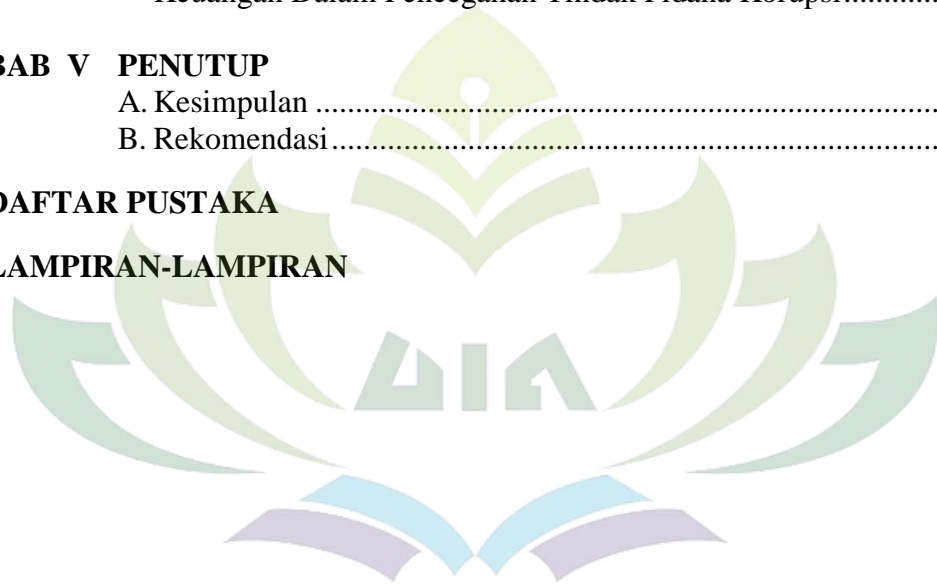




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikansi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Islam Tentang Risywah.....	14
1. Pengertian Risywah.....	14
2. Dasar Hukum Risywah .....	21
3. Hukuman Bagi Pelaku Risywah.....	24
B. Wilayah Mazhalim .....	35
1. Pengertian Wilayah Mazhalim.....	35
2. Tugas dan Wewenang Wilayah Mazhalim .....	36
C. Baitul Maal.....	44
1. Pengertian Baitul Maal .....	44
2. Sejarah Baitul Maal .....	47
D. Tinjauan Pustaka .....	55
<b>BAB III LAPORAN PENELITIAN</b>	
A. Profil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung .....	56
1. Sejarah dan Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan....	56
2. Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung .....	59
3. Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan .....	60

4. Wilayah Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung .....	63
B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Upaya Memberantas Korupsi .....	65
1. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Mencegah Korupsi .....	65
2. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mencegah Korupsi .....	68
 <b>BAB IV ANALISIS</b>	
A. Upaya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Mencegah Korupsi .....	79
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	80
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Rekomendasi .....	84
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Opini Keuangan .....	69
---------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Alur Pengaduan Masyarakat ..... 68





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung)”**. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan maka perlu adanya penegasan judul. Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut :

“*Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.”<sup>1</sup>

“Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>2</sup>

“Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah. Sedapat mungkin dilakukan pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi”.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014). h.4

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 1 ayat (1)

<sup>3</sup> Alwi, Hasan. Dkk. 2007. *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2012. h.65

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>4</sup>. Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan umum, dan merupakan suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh Perundang-Undangan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>5</sup>. Dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *Risywah* yakni memberikan sesuatu dalam rangka memperlancar usaha maupun itu dalam bentuk batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka yang dimaksud penulis dalam judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi” (Studi Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung)” adalah bagaimana upaya Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi dalam mencegah pelaku tindak pidana korupsi.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, yaitu:

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>5</sup> Tri Andarisman, Hukum Pidana, Asas – Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. (Universitas Lampung, 2009). h.70

### 1. Alasan Objektif

Maraknya kasus tindak pidana korupsi yang menimpah para pejabat negara di Indonesia, maka dari itu peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini sangat dibutuhkan dalam rangka memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Tempat penelitian mudah dijangkau oleh peneliti
- b. Pembahasan yang dipilih sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah menjadi wabah penyakit yang menular dalam seluruh lapisan. Korupsi pada saat ini tidak hanya melibatkan para aparat ditingkat Pusat bahkan sudah menjalar ke tingkat Daerah, Kabupaten/Kota bahkan sampai di tingkat Desa.

Hal ini terjadi karena kurang sadarnya aparat negara akan dampak yang akan merugikan keuangan negara, dan juga tindak pidana korupsi ini juga dapat berdampak langsung bagi warga negara yang seharusnya mendapatkan hak – haknya dari negara. Korupsi itu bahkan dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang



cukup berat.<sup>6</sup> Di dalam hukum pidana Indonesia, maka dari itu tindak pidana korupsi ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Korupsi dalam hukum Islam yaitu dapat dikategorikan sebagai *Risywah*. *Risywah* yaitu memberikan sesuatu dalam rangka memperlancar usaha maupun itu dalam bentuk batil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>7</sup>

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ (البقرة : ١٨٨)

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah/2 : 188)*

Hukum perbuatan *Risywah* disepakati oleh Ulama adalah *haram* khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap *halal* sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.

Sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*.<sup>8</sup> Yaitu hukum *takzir* sebab

<sup>6</sup> Danil, Elwi, *KORUPSI: Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.1

<sup>7</sup> Irfan Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.89

keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*, mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *takzir* yang kompetensinya ada di tangan hakim.<sup>9</sup>

Dalam ketetaneagraan Islam ada lembaga yang berwenang dalam memeriksa hal – hal yang terkait dengan masalah keuangan negara. Lembaga tersebut ialah *Wilayah Mazhlim*. Lembaga ini memiliki wewenang dan tugas sebagai pendorong pihak-pihak yang saling bersikap *zhalim* untuk bersikap adil, dengan cara membuat mereka takut dan menghentikan sikap keras kepala orang-orang yang saling bersengketa dengan kewibawaannya.<sup>10</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara yang tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab dalam keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup> Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan suatu lembaga yang bebas dan mandiri dalam mengerjakan tugasnya, berkaitan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat melawakili rakyat dalam pemerintahan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawasi terhadap kinerja pemerintah dan mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam aparat penyelenggara

---

<sup>8</sup> Ghulul adalah penggelapan yakni berkhiatan dalam pembagian harta perang dan harta lain-lain.

<sup>9</sup> *Ibid*, h.103

<sup>10</sup> Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 157

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1

negara dipertegas dalam Undang – Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, di dalam pasal 23E ayat (1) Undang – Undang dasar 1945 disebutkan “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.<sup>12</sup> Lahirnya Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2001 terjadi amandemen ketiga Undang – Undang Dasar 1945 pada pasal ini yang mempertegas keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan yakni mengenai organisai dan kewenangnya, Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Badan Perwakilan pada setiap Provinsi di Indonesia guna meningkatkan ruang lingkup kerja dalam mengawasi aparat atau instansi negara yang melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara.

Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan Untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>13</sup> Bahkan dalam pasal selanjutnya yakni pasal 23E ayat (3) undang – undang dasar 1945

---

<sup>12</sup> Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat (1)

<sup>13</sup> Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat (2)



menyebutkan “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan yang sesuai dengan undang – undang.

Data yang diliris oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang di unggah di situs merdeka.com bahwa ada pejabat negara yakni kepala daerah yang tersandung kasus Korupsi sepanjang tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 ada 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Jumlah terbanyak yaitu pada tahun 2018 dengan 29 kasus (Kepala Daerah) disusul tahun 2014 dengan 14 kasus.<sup>14</sup> Di Provinsi Lampung sendiri terdapat beberapa kasus yang menimpa para Kepala Daerah seperti contoh Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Bupati Lampung Tengah Mustafa dan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Dari permasalahan diatas dapat diketahui bahwa tingkat korupsi dari tahun 2004 sampai dengan 2018 rata – rata menimpah pejabat negara (Kepala Daerah) dan bagaimana upaya Badan Pemeriksa Keuangan yang dalam hal ini diberikan kewenangannya dalam undang – undang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Maka berangkat dari sini penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.”** (Studi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung).

---

<sup>14</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-2004-2018-104-kepala-daerah-tersandung-korupsi-paling-banyak-di-jawa-timur.html> diakses pada tanggal 16 Mei 2019

#### **D. Fokus Penelitian**

Peneliti akan melaksanakan penelitian tentang peran Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung dalam mencegah korupsi di Provinsi Lampung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung yang beralamat Jalan P. Emir m. Noor Nomor 11B, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung dalam mencegah tindak pidana korupsi ?.
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam mencegah tindak pidana korupsi ?.

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana jumlah tindak pidana korupsi di provinsi Lampung setelah adanya Badan Pemeriksa Keuangan berdiri di Provinsi Lampung.

## G. Signifikan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai upaya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.
  - b. Untuk mengetahui tentang sejauh apa peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui permasalahan tentang pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung.
  - b. Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna syarat akademik dalam menyelesaikan studi di fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>15</sup>

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*)  
 Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang

---

<sup>15</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19



sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>16</sup>

- b. Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskripsi analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>17</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari obyek yang diteliti. Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data adalah para pegawai atau staf di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 131 orang.

Sampel adalah contoh refrentasi atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya, bertujuan agar penelitian mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek yang diteliti. Sampel yang akan digunakan adalah *purposive sampling* yang mana mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini maka penulis mengambil sampel sebanyak 3 orang yaitu: Kepala Sub Bagian SDM, Staf Sub Bagian SDM dan Staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.9.

<sup>17</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

<sup>18</sup> Durri Andriani, *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), h. 4.11

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>19</sup> Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden yang terdiri dari anggota Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung ataupun dari pihak yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap informan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri.<sup>20</sup> Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>21</sup> Wawancara

<sup>19</sup> Mohammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

<sup>20</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian ....*, h.12

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 17

dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti anggota atau pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>22</sup>

5. Metode Pengolahan Data

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklarifikasi. Jadi, dalam hal ini yang dimaksud mengolah data adalah secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti ataupun langkah-langkah yang harus diteliti dalam pengolahan data adalah:

a. Pemeriksaan (*editing*)

Pemeriksaan adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang sangat lugas dan mudah dipahami.

b. Sistematis data (*Systematizing*).

Sistematis data adalah menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini

---

<sup>22</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013, h. 198



mengelompokan data secara sistematis dan data yang di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

#### 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit deskriptif kualitatif.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hukum Islam Tentang Risywah

#### 1. Pengertian Risywah

*Risywah* berasal dari kata kerja *rasd-yarsyi* dengan bentuk *masdar* yaitu *risywah*, *rasywah*, atau *nasywah* yang berarti *al-ja'lu* (upah, hadiah, atau suap). Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abu Al-Abbs bahwa kata Risywah bentuk kalimat *Irasya al-farkh* yang artinya anak burung yang merengek-rengok ketika mengangkat kepala induknya untuk disuapi.<sup>1</sup>

Adapun secara terminologis, *risywah* didefinisikan oleh beberapa ahli bahasa dan ahli hukum Islam sebagai berikut :

- a. Menurut Abdullah Bin Muhsin mengatakan risywah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolak orang yang memberi.<sup>2</sup>
- b. Menurut Abd al-Azhim al-Haq bahwa *Risywah* sebagai “sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil.” Penyuaipan dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam menguasai hak atas sesuatu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Irfan, *Gratifikasi dan kriminalitas seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014), h.10

<sup>2</sup> Abdullah Bin Ab. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam, trjmh. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), h. 9

<sup>3</sup> Tim Penulis Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1980), h.720

- c. Menurut Sayyid Abu Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai “memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.”<sup>4</sup>
- d. Menurut Al-Gharyani berpendapat bahwa *risywah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.<sup>5</sup>
- e. Menurut Nurul Irfan *risywah* adalah memberikan sesuatu dalam rangka memperlancar usaha maupun itu dalam bentuk *bathil*/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka *risywah* dapat diketahui bahwa hampir semua mendefinikan dengan kata sesuatu yang diberikan. Pertama, menggunakan kata upah, komisi, hadiah atau suap (*al-ju’lu*). Kedua menggunakan kata upaya untuk melakukan suatu hubungan yang tertentu (*al-wushlah*) yang merupakan bentuk masdar dari kata *washala-yashilu* yaitu hubungan khusus karena teman dekat, kerabat dekat, suku, golongan, dan parpol sehingga kata *al-wushlah* dapat juga berarti kolusi atau kangkalikong antara pihak pemberi dan pihak penerima karena ada tendensi atau kepentingan tertentu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>4</sup> Sayyid Abu Bakr, *I’anaututh thalibin*, (Semarang: Toha Putra 2000), jilid-4, h. 261

<sup>5</sup> Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 2004), h. 123

<sup>6</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam ....*, h.89

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواهُ أحمد : ٦٥٣٢)

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam melaknat penyuap dan yang disuap” (HR. Ahmad no. 6532).<sup>7</sup>

Maksud dari hadis diatas adalah sesungguhnya perkara yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan dosa, dan dosa tersebut bertingkat-tingkat, ada dosa kecil dan dosa besar. *Risywah* (suap) adalah termasuk dalam golongan dosa besar karena ada ancaman dari Allah SWT dan Rasul-Nya

Suap melenyapkan keadilan dan melahirkan banyak bencana sosial ekonomi. Islam tidak saja mengharamkan penyuapan melainkan juga mengancam kedua belah pihak yang terlibat dengan neraka di Akhirat. Suap adalah dosa besar dan kejahatan kriminal di dalam suatu negara Islam. Oleh karena itu, mendapat kekayaan melalui penyuapan jelas haram.<sup>8</sup> sementara itu, jika seseorang memberi hadiah agar terhindar dari kezhaliman atau agar mendapatkan hak yang wajib diberikan kepadanya, hadiah semacam ini hanya haram bagi penerima, tetapi halal bagi pemberi kalau ia telah memberikan hadiah tersebut kepadanya.

Dengan demikian dalam kasus *risywah* melibah tiga unsur yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*), dan barang bentuk dan jenis pemeberian yang

<sup>7</sup> Lihat Al-Syaukani, *Nail al Autar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), jilid 9, h. 172

<sup>8</sup> Chaudhry, Muhammad Sharif, *SISTEM EKONOMI ISLAM : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: KENCANA, 2012) h. 54



diserahterimakan.<sup>9</sup> Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan tiga unsur, melainkan melibatkan unsur keempat yaitu perantara bahkan bisa juga melibatkan unsur kelima, yaitu pencatat kesepakatan.

Suap menurut madzhab Hanafi dalam fatwa *Qadi'Khan* (tokoh madzhab Hanafiah) disebutkan: kalau seorang anak hakim, atau notulen nya, atau salah satu pegawainya menerima suap, dan kasusnya diserahkan kepada hakim tersebut untuk diputuskan hukumannya, maka keputusan hakim diterima kalau dia tidak mengetahui transaksi suap yang terjadi. Tapi jika hakim mengetahui praktek kolusi yang terjadi di kerabatnya, maka keputusannya ditolak. Jika praktek suap sudah menjadi kebiasaan, maka posisi hakim tidak diakui lagi.<sup>10</sup>

Jika seseorang meminta bantuan untuk memperlancar urusan birokrasinya tanpa didahului dengan uang pelicin (diberikan setelah urusannya berakhir) maka para ulama berpendapat berbeda, sebagian ulama tidak membenarkan bagi orang yang menerimanya sebagian lagi membenarkan (sah), karena hal tersebut adalah sifat balas budi (seperti orang yang bertindak imam sekaligus muadzin tanpa disertai dengan syarat tertentu). Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan

---

<sup>9</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam ....*, h.90

<sup>10</sup> Abdul, Ghani, *Hukum Suap & Hadiah*, (Jakarta Selatan: Cendikia Sentra Muslim, 2003) h. 123

dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.<sup>11</sup>

Suap menurut Madzhab Syafi'i yang dikemukakan oleh Ibnu Rif'ah dalam *Kifayat An-nabawiyah Fi Syarh At-Tanbiyah* berkata "Tidak dibenarkan seorang hakim menerima suap". Penyebab yang mendasar adalah jika sang hakim menerima suap untuk melenceng dari kebenaran yang akan diputuskan, sehingga hukumnya haram. Sangat jelas sekali, bahwa menerima suap hukumnya haram. Jika menerima suap dengan maksud tidak memberi keputusan hukum secara objektif, sementara dia berwenang untuk memutus kepada pihak yang bersengketa, maka menghindar untuk memberi keputusan hukum diharamkan baginya.<sup>12</sup>

Mayoritas pemuka ulama Syarfi'i Abu Tayib, Mawardi, dan Ibnu Sibagh berkata "jika seseorang memberi suap untuk memutuskan secara hukum secara tidak benar atau menahan supaya tidak memberi hukum dengan benar, maka hukumnya haram. Tapi jika ia memberi suap agar hak-haknya tercapai, maka tidak diharamkan baginya, meskipun haram buat orang yang menerimanya, sebagaimana tidak ada salahnya buat dia jika ingin membebaskan tawanan dengan tebusan hartanya."<sup>13</sup>

Suap menurut madzhab Maliki yang dikemukakan dari tokoh madzhab Maliki diantaranya dalam *muktasar Khalil* dan *syarh* oleh muridnya, Bahram menyatakan jika dimaksud untuk meminta keputusan hukum atas dasar kebodohan dan cinta dunia, maka hukumnya haram.

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 71

<sup>12</sup> *Ibid*, h.133

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 140

Kebodohan dapat menyalahi hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga terjerumus dalam urusan yang sesat, sedangkan cinta dunia dapat menjadi penyebab kesengsaraan.<sup>14</sup>

Suap menurut madzhab Hambali dikemukakan oleh para tokoh diantaranya Al-Allamah Asy-Syaikh Mansur Al Bahwati rahimahulullahu dalam *syarh Al Iqna'a* berkata “haram bagi seorang hakim untuk menerima suap”. Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah ada permintaan, jika orang yang akan memeberikan suap suntuk membentengi dia dari kezhaliman, dan dia berada di jalan yang benar, maka hukumnya halal.<sup>15</sup>

Larangan dalam hukum muncul karena adanya tendensi atau dikarenakan posisinya sebagai hakim meskipun hadiah itu datangny dari karib kerabat, karena pada gilirannya hakim tidak akan sepenuhnya mampu berlaku adil.

Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia Korupsi (berasal dari bahasa latin yaitu *Corruption* = Penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>16</sup> Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang usuk,jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparaturn pemerintah,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 138

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 144

<sup>16</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 8

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi).<sup>17</sup>

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing menggugah kesetian dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun pada kenyataannya sekarang kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para pelaku yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan. Pada kasus yang terjadi di Indonesia, para pelaku bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka rata-

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.9

<sup>18</sup> *Ibid*, h.11



rata bukan dari kalangan yang tidak mampu dalam hal keuangan melainkan mereka dari keluarga konglomerat.

- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tansisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat seluruhnya.

## 2. Dasar Hukum Risywah

### a. Al-Qur'an

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ (البقرة)

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah/2 : 188)*<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...., h.29

Dalam Surah Al-Maidah ayat 42

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَلُونَ لِلْحَسَنِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ ( المائدة : ٤٢ )

Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Al-Maidah/5 : 42).<sup>20</sup>

Dalam surah An-Nisa ayat 29-30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ ( النساء : ٢٩, ٣٠ )

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (29).dan Barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami telah akan memasukkannya kedalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (An-Nisa/4 :29-30).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...., h. 115

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...., h. 42

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه أحمد: ٦٥٣٢)

*“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam melaknat penyuap dan yang disuap” (HR. Ahmad no. 6532).<sup>22</sup>*

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، والراشي يعني الذي يمشی بينهما<sup>23</sup>

*“Rasulullah SAW. Melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya” (HR Ahmad).*

Pada hadis diatas diterangkan bahwa Rasulullah SAW melaknat penyuap, yang menerima suap dan juga orang yang menjadi perantara dalam kasus suap. Jadi dalam hadis ini jelas bahwasannya orang yang menjadi perantara dalam suap tersebut juga dilaknat oleh Allah SWT.

c. Ijma

Secara umum, tidak ada perselisihan antar ulama mengenai haramnya perilaku *risywah* (suap). Imam Al Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 42 berkata: “Dan tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan risywah untuk menolak yang haq atau dalam perkara yang dilarang merupakan risywah (suft) yang haram”. Ibnu Qudamah dalam kitabnya berkata: “Adapun suap-

<sup>22</sup> Lihat Al-Syaukani, *Nail al Autar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), jilid 9, h. 172

<sup>23</sup> Saifudin, “Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia”. *Az Zarqa*, Vol 9 No. 2 (Desember 2017), h. 265

menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat dikalangan ulama”.<sup>24</sup>

### 3. Hukuman Bagi Pelaku *Risywah*

Berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukuman *takzir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*.<sup>25</sup> *Takzir* secara etimologi adalah bentuk *masdar* atau *verbal noun* dari kata kerja yang berarti yakni menolak dan mencegah. Atau memiliki arti yakni menolong dan menguatkan.<sup>26</sup> *Takzir* secara terminologis adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar’i* seperti pengajaran yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).

*Takzir* memang bukan termasuk dalam kategori hukuman *hudud*. Namun bukan berarti tidak boleh lebih keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan diantara sekian banyak jenis dan bentuk *takzir* berupa hukuman mati. Dengan demikian, *takzir* adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena itu hukuman *takzir* tidak ditemukan langsung di dalam Al-qur’an dan Hadis

---

<sup>24</sup> Bahgia, “*Risywah* Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1 (Desember 2013), h. 159-160.

<sup>25</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam ....*, h. 103

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 146



maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.

Dalam memberikan definisi *Takzir*, Ibnu manzhur menjelaskan bahwa *takzir* adalah satu jenis hukuman yang tidak termasuk *had*, berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari rutinitas kejahatannya, juga untuk menolak pelaku dari berbuat kemaksiatan.

Al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh *syariat* (Alquran dan Hadis), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk kedalam kategori sanksi-sanksi *takzir* yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.

Lebih lanjut al Thariqi menjelaskan bahwa sanksi *takzir* bagi pelaku jarimah/tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكَ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِي

(رواه مسلم)

*Dari abu Sa'id Khudri Radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihim wa sallam bersabda : Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah lemahnya iman (HR. Muslim).<sup>27</sup>*

Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut.<sup>28</sup> Pernyataan al-thariqi yaitu bahwa kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apalagi kemungkaran kolektif seperti suap menyuap salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani oleh Pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa.

Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah membagi hukuman *takzir* menjadi dua bagian besar, pembagian ini ditinjau dari segi hak yang dilanggar oleh pelaku, yaitu hukuman *takzir* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah, dan hukuman *takzir* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia. Ia telah menjelaskan bahwa sanksi-sanksi *takzir* sama dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan (*qisas/hudud*), sebagian merupakan hak Allah dan sebagian merupakan hak manusia.

<sup>27</sup> A. M. Ari Wahyudi, "KEWAJIBAN MENGUBAH KEMUNGKARAN" (On-Line), tersedia [dimuslim.or.id/158-kewajiban-mengubah-kemungkaran.html](http://dimuslim.or.id/158-kewajiban-mengubah-kemungkaran.html) (04 Desember 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

<sup>28</sup> *Ibid* h. 113

Selanjutnya, ia memberikan contoh beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah dan pelakunya harus dihukum *takzir*, seperti perbuatan dan ajaran-ajaran *bid'ah* yang merusak dan mengacaukan kebenaran agama Islam, mencaci Nabi Muhammad SAW dan melecehkannya, penculikan dan perdagangan bayi dan wanita untuk diperkerjakan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK), produsen dan pengedar *khamar/narkoba*, manipulasi dan penipuan-penipuan dalam berbisnis, *gasab*, *risywah*, memakan riba, dan kesaksian palsu.<sup>29</sup>

Hukuman *takzir* berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim dihukum *takzir* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *takzir* agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>30</sup>

Dalam melaksanakan hukuman *takzir* ada beberapa macam hukuman *takzir* tersebut, macam-macam hukuman *takzir* adalah :

a. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Lihat Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-uqubah fi fiqh al Islami*, h.61

<sup>30</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:AMZAH, 2016), h. 93

### 1) Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *takzir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk islam. Dapat disimpulkan bahwa menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi *takzir* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya. Oleh karena itu, sangatlah tepat kiranya menetapkan hukuman mati bagi koruptor serta produsen dan pengedar narkoba yang termasuk kedalam kategori *jarimah takzir* karena sangatlah merugikan masyarakat dan membahayakan umat manusia.<sup>31</sup>

### 2) Hukuman cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah takzir*. Jumlah cambukan dalam *jarimah hudud* zina *ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam *nash* keagamaan. Namun dalam *jarimah takzir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *jarimah*, kondisi pelaku, dan efek

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 98



bagi masyarakat. Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan berikut :

- a) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
- b) Hukuman cambuk dalam *takzir* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing *jarimah* berbeda jumlah cambukannya.
- c) Penerapan hukum cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.
- d) Hukuman cambuk yang bersifat pribadi sehingga tidak sampai melantarkan keluarga terhukum.

b. Sanksi *Takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

1) Hukuman Penjara

Menurut Ibnu Qayyim, *al habsu* bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun tempat lain.<sup>32</sup> Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Dalam sanksi penjara ini

---

<sup>32</sup> Lihat Ibnu Qayyim, *Thuruq Al-Hukmiyah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2010), h.119-120

tetap dipertahankan sebagai sanksi hukuman yang di Indonesia dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Ulama bahkan mengharuskan adanya pengobatan apabila terdakwa sakit dan menganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat mereka.<sup>33</sup> Hukuman penjara dalam *syariat* Islam terbagi menjadi dua, yaitu Hukuman Penjara Terbatas dan Hukuman Penjara Tidak Terbatas.

## 2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman *had* yang diterima untuk pelaku tindak pidana perampokan Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ (سورة  
المائدة : ٣٣)

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian ini kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar (QS. Al-Maidah/5 : 33).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.208-209

<sup>34</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ...., h. 114

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *takzir*. Diantara *jarimah takzir* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *makhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW dengan mengasingkan ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Khalifah Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan *jarimah*. Demikian pula tindak pidana pemalsuan stempel baitul maal seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Al-Khaththab terhadap Mu'an bin Zaidah yang dijatuhi hukuman pengasingan setelah sebelumnya dikenakan hukuman cambuk.<sup>35</sup> Dalam hal ini sepertinya hukuman membuang narapidana ke Pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat dan maksud, mengingat negeri Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau kecil sehingga sangatlah efektif jika hukuman ini memanfaatkan pulau-pulau tersebut. Hukuman ini dilakukan sampai terhukum bertobat dan di tempat pembuangan ia harus selalu diawasi agar jangan sampai melarikan diri.<sup>36</sup>

### 3) Hukuman *Takzir* yang Berkaitan dengan Harta

Hukuman *takzir* yang mengambil harta buka berarti mengambil harta pelaku diri hakim atau kas negara, melainkan

---

<sup>35</sup> Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam ....*, h.105

<sup>36</sup> H.A. Djazuli. *Fiqh jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam ....*, h. 210

hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat men-*tasharruf*-kan (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.<sup>37</sup> Menurut Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *takzir* ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta :

a) Menghancurkan (*Al-Itlaf*)

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Berikut ini beberapa contohnya :

- (1) Penghancuran patung milik orang lain.
- (2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengundang maksiat.
- (3) Penghancuran peralatan dan kios khamar. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios tempat dijualnya khamar milik Ruwaisid. Umar pun memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisid. Demikian pula khalifah Ali yang pernah memutuskan membakar kompleks yang menjual khamar. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, Maliki, dan lain-lainnya.
- (4) Penumpahan susu yang sudah bercampur dengan air. Khalifah Umar pernah menumpahkan barang dagangan berupa susu yang sudah bercampur dengan air. Ia

---

<sup>37</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam ....*, h. 107

melakukan hal itu karena sulit mengetahui kadar susu yang sudah bercampur dengan air.<sup>38</sup>

b) Mengubahnya (*Al-Taghyir*)

Contoh hukuman *takzir* berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip dengan pohon atau vas bunga. Mengubah patung yang indah dengan dipotong di bagian leher dipastikan akan membuat pemilik benda itu kecewa, bahkan marah. Akan tetapi, hal ini akan dilakukan dalam rangka memberi hukuman kepada pelaku.

c) Memilikinya (*Al-Tamlík*)

Hukuman *takzir* dalam bentuk ini juga disebut juga dengan hukuman denda yaitu hukuman *takzir* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan bagi seseorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri. Contohnya, penjatuhan hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri buah-buahan dari pohonya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembalaanya.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 108



Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda digabungkan dengan hukuman cambuk.<sup>39</sup> Denda yang tidak dapat dipastikan kesempurnaanya adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda diterapkan berdasarkan ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan *syariat* serta tidak ada ketetapan *hudud* nya.<sup>40</sup>

#### 4) Hukuman *Takzir* dalam Bentuk Lain

Selain hukuman-hukuman *takzir* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *takzir* lainnya yaitu :

- a) Peringatan keras.
- b) Dihadirkan dihadapan sidang.
- c) Nasihat.
- d) Celaan.
- e) Pengucilan.
- f) Pemecatan, dan
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi yang *takzir* sangat beragam, mulai dari yang paling ringan seperti pemecatan hingga ke yang paling berat seperti hukuman mati. Oleh sebab itu, tindak pidana

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 266

<sup>40</sup> Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2002), h. 36

korupsi termasuk ke dalam ranah *jarimah takzir*, agar dapat disesuaikan dengan besar atau kecilnya harta yang dikorupsi dan seberapa banyak kerugian negara. Kalau korupsi termasuk kedalam kelompok *jarimah hudud* justru akan mempersempit cakupan sanksi yang diberlakukan, yaitu maksimal hukuman potong tangan. Di sisi lain bisa jadi tindak pidana korupsi di Indonesia yang sangat masif dan hampir terjadi di semua lini ini memerlukan terapi kejut dengan cara memberlakukan hukuman mati sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan pasal ini sejalan dengan konsep hukuman mati sebagai *takzir*. Jika memang tidak akan dilaksanakan, ada baiknya rumusan pasal ini ditinjau ulang untuk kemudian dihapuskan. Hal ini lebih baik daripada adanya sama dengan tidak adanya.<sup>41</sup>

## **B. Wilayah Mazhalim**

### **1. Pengertian *Wilayah Mazhalim***

*Wilayah Mazhalim* adalah sebuah lembaga dalam pemerintahan islam yakni untuk mendorong pihak-pihak yang saling bersikap *zhahim* untuk bersikap adil, dengan cara mereka takut dan menghentikan sikap keras kepala orang yang saling bersengketa dengan kewibawaannya. Oleh karena itu orang yang menduduki jabatan ini harus orang yang terhormat, ditaati masyarakat, berwibawa, bersih jalan hidupnya, sedikit ketamakannya dan banyak waranya. Karena dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>41</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam ....*, h. 110

ia harus memiliki sifat yang gagah seperti seorang ksatria dan ketegasan seorang *qadhi* maka ia harus memiliki kedudukan dan keistimewaan yang dimiliki oleh 2 kelompok itu, sehingga dengan statusnya itu keputusan dan perkataanya di dengar dan dipatuhi oleh karena kedua kelompok itu.<sup>42</sup>

Adanya lembaga *Wilayah Mazhalim* yaitu suatu lembaga mengawasi dan menggelar peradilan terhadap kezhaliman penguasa atau pejabat publik. Yang menarik dari lembaga ini adalah bahwa lembaga ini dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan<sup>43</sup>. *Wilayah Mazhalim* adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan *muhtasib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk kedalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa penganiayaan/pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa.<sup>44</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang *Wilayah Mazhalim*

Dalam kelembagaannya *Wilayah Mazhalim* memiliki tugas wewenang yaitu sebagai berikut :

- a. *Wilayah Mazhalim* menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan cacatan yang buruk baginya, ini adalah salah satu tugas *mazhalim*, yang tidak sekedar mengurus

---

<sup>42</sup> Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam ....*, h. 158

<sup>43</sup> Harun, Al-Rasyid, *Fikih Korupsi : Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif maqasid al-Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2016), h.286

<sup>44</sup> Topo, Santoso, *Membumikan Hukum Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta : Gema InsaniPress, 2003) h. 55

masalah pelanggaran yang biasa, sehingga ia mempunyai wewenang untuk meneliti perilaku para pejabat, untuk mendukung mereka jika mereka berlaku adil dan jujur, mencegah perbuatan mereka jika mereka berlaku korup, dan mengganti mereka jika tidak adil dan tidak jujur.<sup>45</sup>

- b. *Wilayah Mazhalim* menangani sikap korup para pejabat pemerintah atas harta yang mereka pungut dari rakyat. Untuk menangani petugas *mazhalim* perlu melihat kembali undang-undang yang adil dalam catatan pembukuan negara dan ketetapan pemerintah sebelumnya tentang pungutan itu, untuk kemudian menggunakan ketetapan itu bagi manusia, dan memerintahkan kepada para petugas untuk menarik pungutan kepada rakyat hanya sesuai dengan ketetapan itu. Jika ditemukan fakta bahwa para petugas itu telah menambah jumlah pungutan dari yang seharusnya, perlu diselidiki kemana tambahan pungutan itu diserahkan, jika kelebihan itu mereka masukan ke dalam *baitulmal*, hendaknya ia memerintahkan untuk mengembalikannya kembali kepada rakyat, jika para petugas itu mengambilnya untuk diri mereka sendiri, hendaknya harta itu diminta kembali dari mereka untuk kemudian dikembalikan kepada para pemiliknya semula.
- c. *Wilayah Mazhalim* bertugas sebagai pencatat administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukmin untuk mencatat kepemilikan harta. Pejabat

---

<sup>45</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam....* h.

Mazhalim perlu memeriksa pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka itu, apakah ada pelanggaran, pengurangan, penambahan, atau penggelapan dalam tugas mereka. Jika ada kesalahan mereka, perlu segera diluruskan kesalahan itu atau diberikan hukuman yang setimpal.

46

- d. *Wilayah Mazhalim* menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan pemeberian gaji itu kepada mereka. Untuk kasus ini, pejabat *Mazhalim* dapat melihat kembali administrasi negara tentang penetapan gaji dan tunjangan sosial, untuk kemudian memberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sambil meneliti penyunatan yang pernah terjadi atau yang pernah tidak diberikan kepada mereka. Jika harta itu diambil oleh para pejabat yang mengurus mereka, ia meminta kepada para pejabat itu untuk mengembalikan apa yang mereka ambil itu, sedangkan jika para pejabat itu tidak mengambilnya, ia dapat menutupi kekurangan itu dari *baitulmal*.
- e. *Wilayah Mazhalim* bertugas mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat.
- f. *Wilayah Mazhalim* bertugas mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dalam dua macam : wakaf umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan, untuk menjamin penggunaan wakaf itu sesuai dengan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.165



ketentuan yang ada dan berdasarkan rencana dan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak pemberi wakaf. Hal itu ia dapat ketahui dari tiga sumber yaitu, 1) dari catatan administrasi para pejabat yang bertugas untuk menjaga hukum, 2) dari administrasi negara, yang mencatat transaksi yang berlangsung, atau catatan-catatan khusus, 3) atau juga dari dokumen tertulis yang telah lama ditulis, dan dipercayai, meskipun tidak ada saksi-saksi yang menguatkan persaksian mereka. Karena, dalam masalah ini tidak diperlukan adanya pihak penuntut dan jangkauan hukum bagi wakaf umum ini lebih luas daripada wakaf khusus. Wakaf khusus penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau mereka yang berhak menerima wakaf itu saat terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan kasus tertentu. Saat terjadi persengketaan dalam masalah ini dipergunakan dokumen-dokumen yang menjelaskan status tanah/harta itu dan tidak boleh dikembalikan kepada dokumen administrasi pemerintah atau apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen lama jika tidak diperkuat oleh saksi-saksi yang kompeten dan kredibel.<sup>47</sup>

- g. *Wilayah Mazhalim* menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para *qadhi* yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh. Misalnya, pihak yang tertuduh adalah pejabat tinggi, orang yang

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 166

berkuasa atau orang yang terpandang. Dalam kasus seperti ini, pejabat *mazhalim* dapat turun tangan karena adanya kekuatan yang ia miliki dan lebih efektifnya keputusan hukum yang ia buat, sehingga dapat dengan mudah memutuskan untuk menyita harta yang berada dalam genggamannya pihak yang bersalah atau memerintahkan untuk menyerahkan harta yang ia kuasai.

- h. *Wilayah Mazhalim* menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat *mungkar* secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta. Dalam kasus seperti ini pejabat *mazhalim* turun tangan untuk mengambilnya dari mereka sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan mewajibkan mereka untuk menaati peraturan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>48</sup>
- i. *Wilayah Mazhalim* memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad; apakah ada kekurangan dalam pelaksanaannya dan ketidaklengkapan syarat-syaratnya. Hal ini dilakukan karena hak-hak Allah harus dipenuhi dan kewajiban-kewajiban dari-Nya harus ditunaikan.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.167

j. *Wilayah Mazhalim* menangani kasus pertengkaran dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam menjalankan wewenangnya itu, pejabat *mazhalim* tidak boleh keluar dari tuntunan kebenaran dan tidak boleh memberikan keputusan hukum yang tidak sesuai dengan keputusan hukum yang ditetapkan oleh para hakim dan para *qadhi*, karena bisa saja pejabat *mazhalim* bertindak tidak adil sehingga keputusan hakimnya ternyata melanggar tuntunan *syariat*.

Dapat dilihat pada zaman Nabi SAW. Dalam menangani korupsi tampak lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari perbuatan korupsi dan mengingatkan hukuman ukhrowi yang akan ditimpahkan kepada pelakunya. Dengan berbagai kesempatan Nabi SAW mengingatkan bahwa pelaku korupsi akan masuk neraka sekalipun jumlah nominal korupsinya amat kecil seperti seutas tali sepatu atau sebuah mantel.<sup>49</sup>

Namun demikian dalam hukum *syariah* tidak berarti bahwa perbuatan korupsi tidak dapat dipidana. Dalam *syariah* ada sistem pidana *takzir*, yaitu suatu kewenangan yang diberikan kepada pemilik kewenangan untuk melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap kejahatan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW tidak ditentukan pidananya, seperti kasus korupsi ini. Selain karena nominal korupsi di zaman Nabi SAW kecil, mungkin juga beliau dengan sengaja untuk

---

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, 'Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam'. *JURNAL HUKUM*, Vol. 15 No. 1 (Januari 2008), h. 29

menyerahkan kebijakan umatnya sendiri untuk melakukan kriminalisasi korupsi sesuai dengan perkembangan tarap kehidupan masyarakat zaman masing-masing.<sup>50</sup>

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya korupsi, seperti melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat se usai menjalankan tugas, dalam hal ini *wilayah mazhalim* melakukan tugasnya untuk memeriksa para pejabat, selain itu Rasulullah SAW berupaya menimbulkan suatu efek psikologis sedemikian rupa sehingga masyarakat sangat menakuti korupsi. Hal ini dilakukan misalnya dengan penolakan Nabi SAW untuk menshalatkan jenazah koruptor (cukup sishalatkan oleh Sahabatnya saja), koruptor akan masuk neraka meskipun nominalnya kecil, pelaku *risywah* akan mendapatkan laknat Allah SWT, dan sedekah dan infak hasil korupsi tidak diterima Allah SWT.<sup>51</sup>

Fungsi kontrol terhadap pemangku kebijakan dan pemangku kekuasaan sangat mutlak untuk dilakukan adanya kontrol yang berkala dan terus menerus dilakukan dapat mengurangi adanya resiko penyelewengan-penyelewengan dalam kekuasaan.<sup>52</sup> Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini dilengkapi dengan petugas-petugas pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang dalam pemeriksaan. Lembaga ini pula dilengkapi pula dengan hakim-hakim yang

---

<sup>50</sup> *Ibid.* 30

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi : Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif maqasihid al-Syariah* ...., h.286

pandai untuk dimintai pendapat tentang jalannya pemeriksaan. dilengkapi pula ahli *ahl fiqih* dan panitera yang mencatat segala keterangan yang diberikan masing-masing pihak.<sup>53</sup>

Mejalis pengadilan *mazhalim* hendaknya dihadiri oleh lima macam petugas, yang tidak dapat ditinggalkan, dan tugas itu tidak dapat langsung dengan baik tanpa kehadiran mereka. Mereka itu adalah :

1. Para penjaga dan pembantu untuk menarik kekuatan dan meluruskan pihak yang berani.
2. Para *qadhi* dan pejabat pemerintah yang berfungsi untuk mengetahui fakta-fakta kebenaran yang kemudian ditemukan dan menyaksikan penanganan kasus yang sedang diurus ditempat itu.
3. Para *fuqaha* yang berfungsi sebagai sumber rujukan dalam masalah yang sulit dan menjadi tempat bertanya tentang masalah yang problematis dan rumit.
4. Para sekretaris yang bertugas mencatat pembicaraan yang berlangsung dalam majelis itu serta ketetapan-ketetapan yang dibuat kemudian, baik hak-hak seseorang maupun kewajibannya, dan
5. Para saksi yang berfungsi sebagai saksi atas hak yang telah ditetapkan dan hukum yang telah diputuskan.<sup>54</sup>

Lembaga yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan rakyat atas tindakan penguasa ini, dalam sejarahnya, telah berlangsung

---

<sup>53</sup> Topo, Santoso, *Membumikan Hukum Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda ....*, h. 56

<sup>54</sup> Imam, Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam ....*, h. 162



lama. Lembaga ini dikenal di kalangan bangsa Persia dan Arab. Dimasa Nabi SAW, Nabi sendiri yang menerima pengaduan dari rakyat. Dimasa Khulafaur Rasyidin, lembaga ini belum dikembangkan mengingat sengketa-sengketa dapat diselesaikan di pengadilan biasa dan rakyat pun masih sangat kuat dipengaruhi ajaran agama. Dimasa Khalifah Abdul Malik bin Marwan lah disediakan waktu tertentu untuk menerima pengaduan rakyat tentang para pejabat. Itu terus berlanjut hingga masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal tegas dalam memerangi kezhaliman pejabat dan juga dimasa Khalifah Harun al-Rasyid dan selanjutnya.<sup>55</sup>

### C. Baitul Mal

#### 1. Pengertian *Baitul Mal*

*Baitul mal* berasal dari bahasa arab *bait* yang artinya rumah, dan *al mal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis *Baitul Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis *Baitul mal* adalah sebuah lembaga tempat penampung keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan dibelanjakan.<sup>56</sup> Setiap harta baik, tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas pedagang maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum dan syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka secara

---

<sup>55</sup> Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 11

<sup>56</sup> Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar ibn al-Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.5

hukum, harta-harta itu adalah milik *Baitul Mal*, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi *Baitul Mal* dan harta-harta tersebut adalah milik *Baitul Mal* baik yang benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan *Baitul Mal* maupun yang belum.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran *Baitul Mal*, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan *Baitul Mal*. Dengan demikian *Baitul Mal* mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga yang menangani harta negara, baik pendapatan ataupun pengeluaran.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *Baitul Mal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan *syariat*. Sedangkan menurut Harun Nasution, *Baitul Mal* bisa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara). Secara harfiah, *Baitul Mal* berarti rumah dana. *Baitul Mal* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, berkembang pesat pada abad pertengahan. *Baitul Mal* berfungsi untuk *men-tasyaruf* kan untuk kepentingan sosial.<sup>57</sup> Pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana

---

<sup>57</sup> Agus Marimin, “Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 14, No. 02 (Januari 2014), h. 41

tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas *Baitul Mal* selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka *Baitul Mal* secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut. Umar menunjuk orang yang mengurus *Baitul Mal* dan menjaga harta yang ada didalamnya, menerima pemasukan dan melaksanakan perintah pengeluaran serta hal-hal lain yang perlu dikerjakan. Tujuan dasar dari pembuatan *Baitul Mal* dan mengaturnya pada masa Umar adalah untuk mengawasi harta dan mengatur urusan pengumpulan dan pengeluaran, pada masa ini dibuatnya buku induk yang berjuan untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran *Baitul Mal*. Dari pembuatan buku induk tersebut tercatat semua pemasukan *Baitul Mal* dan pengeluarannya. Pengawasan tersebut dilakukan melalui penyeimbang akhir dengan angka-angka yang realistis bagi masing-masing pemasukan dan pengeluaran (penghitungan akhir), sehingga hal tersebut dapat dipastikan untuk terwujudnya tujuan yang diharapkan, sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan atau kelalaian terhadap harta yang ada didalam *Baitul Mal*.<sup>58</sup>

Menurut pendapat Suhrawardi K. Lubis, *Baitul Mal* dilihat dari segi istilah *fikih* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus

---

<sup>58</sup> Anis Marsela, “Kebijakan terhadap pengawasan harta *Baitul Mal* di Masa Khalifah Umar Bin Khatab”. (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011) h.46

kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan pengeluaran dan lain-lain.<sup>59</sup>

## 2. Sejarah *Baitul Mal*

Pada masa Rasulullah SAW keberadaan *Baitul Mal* muncul ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang badar. Pada masa ini baitul mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin baik berupa pendapatan atau pengeluaran. Karena pada saat itu *Baitul Mal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta dan benda yang diperoleh belum begitu banyak. Karena harta yang diperoleh selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Adanya *Baitul Mal* sebagai tempat mengelola harta negara baik pemasukan ataupun pengeluaran juga mempermudah para *Amir* dan *Khalifah* memungut dan mengelola zakat pada setiap orang muslim, karena ibadah zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ :التوبة

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

<sup>59</sup> Abdul Maman, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2012), h.41

*ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah/9 : 103).*<sup>60</sup>

Pada masa Abu Bakar, dibuatlah kebijakan-kebijakan untuk pengembangan baitul mal dan pengangkatan penanggung jawab *Baitul Mal* dan Abu Ubaid ditunjuk sebagai penanggung jawab baitul mal setelah 6 bulan Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan itu di bangunlah sebuah rumah untuk *Baitul Mal*. Sistem pendistribusian yang lama tetap dilanjutkan, ia sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya.<sup>61</sup>

Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara disimpan dalam *Baitul Mal* untuk langsung di distribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Seperti halnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash-Shidiq juga melaksanakan kebijakan pembagian telah hasil taklukan, sebagian diberikan kaum muslimin sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Disamping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian di manfaatkan demi kepentingan umat islam secara keseluruhan.<sup>62</sup>

Dalam mendistribusikan harta *Baitul Mal* tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membedakan antara

---

<sup>60</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT, Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 203

<sup>61</sup> M.A Sabzwari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 44

<sup>62</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Soeroyo*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 320



sahabat yang terlebih dahulu memeluk islam dengan sahabat yang baru memeluk islam, antara hamba dan orang merdeka, dan antara pria dan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan. Dengan demikian selama masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shidiq harta *Baitul Mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin bahkan ketika Abu Bakar wafat hanya satu dirham yang tersisa dalam pembendahraan keuangan. Pada awal kepemimpinannya beliau mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dengan penuh keterebukaan dan keterusterangan beliau mengatakan kepada umatnya bahwa perdagangan beliau tidak akan mencukupi untuk memenuhi adanya beban sebagai kepala negara akan mengurani aktivitas dagangnya karena sibuk mengurus urusan negara.

Pada masa Umar ibn al-Khattab seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini, membutuhkan perhatian khusus untuk mengelolanya agar bisa dimanfaatkan secara benar, efektif, dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat, *Khalifah* Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta *Baitul Mal* sekaligus, tetapi dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya di

pergunakan sebagai cadangan cikal bakal *baitul mal* memang telah diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan Abu Bakar, dan semakin dikembangkan fungsinya pada masa Umar ibn al-Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen.

Maka dibentuklah perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke tujuh sesudah masehi. Pada masa Umar juga umat islam banyak yang berhasil menaklukkan negara lain maka semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Untuk menyimpan harta-harta tersebut, baitul mal yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota dan kemudian di bangun cabang-cabangnya di ibukota provinsi pada masa ini Umar ibn al-Khattab menunjuk Abdullah bin Arqom dan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari serta Muqayad sebagai asistennya.<sup>63</sup>

Walaupun pada masa ini dan properti *Baitul Mal* dikontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyampaian (seperti zakat dan *ushr*) mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara itu di tujukan pada kelas-kelas tertentu dalam masyarakat harus di belanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Properti *Baitul Mal* dianggap sebagai "harta kaum muslim" sedangkan *Khalifah* dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi merupakan tanggung jawab negara untuk mengadakan tunjangan yang

---

<sup>63</sup> Ilfan Muhammad Ilfana Ro'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Al-Khattab* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 150

berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin orang miskin, membayar utang orang-orang bangkrut, membayar *diyat* untuk kasus-kasus tertentu (membayarkan *diyat*), dan meminjamkan uang tanpa bunga untuk hal yang bersifat komersil. Pada masa Umar Ibn Al-Khattab, *Baitul Mal* menerima pemasukan dari sesuatu yang halal dan sesuai dengan aturan *syari'ah* dan mendistribusikannya kepada yang berhak.

Bersamaan dengan reorganisasi lembaga *Baitul Mal* sekaligus sebagai perealisasi salah satu fungsi negara islam, yaitu fungsi jaminan sosial, *Khalifah Umar ibn al-Khattab* membentuk sistem *diwan* yang menurut pendapat terkuat didirikan pada tahun 20 H.<sup>64</sup> Dalam rangka ini Umar ibn al-Khattab menunjuk sebuah komite *nasab* ternama yang terdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah bin Naufal, dan Jabir bin Mu'im untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya. Daftar tersebut disusun secara berurutan dimulai dari orang-orang yang mempunyai hubungan pertalian dengan Nabi Muhammad SAW, kelompok Al-Asabiqun Awwalun, hingga seterusnya kaum wanita, anak-anak dan para budak juga mendapat tunjangan sosial.<sup>65</sup>

Dengan kata lain, *Khalifah Umar ibn Khattab* menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta *Baitul Mal*. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat islam harus diperhitungkan dalam

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 155

<sup>65</sup> *Ibid*, h.156

menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan, karenanya keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan islam harus dipertahankan dan di balas sebaik-baiknya, namn dikemudian hari *Khalifah* Umar ibn al-Khattab menyadari bahwa cara tersebut keliru karena membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Ia bertekad akan mengubah kebijakan tersebut apabila masih diberi kesempatan hidup. Akan tetapi, *Khalifah* Umar ibn al-Khattab telah tewas terbunuh sebelum rencananya berhasil direalisasikan.<sup>66</sup>

Untuk mendistribusikan harta *Baitul Mal*, *Khalifah* Umar ibn al-Khattab mendirikan beberapa dapartemen yang dianggap perlu seperti :

- a. Dapartemen pelayanan militer, dapartemen ini bertanggung berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- b. Dapartemen kehakiman dan eksekutif, dapartemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.

---

<sup>66</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Terj. Soeroyo ....*, h. 164

- c. Departemen pendidikan dan pengembangan islam, departemen ini mendistribusikan bantuan bagi para penyebar dan pengembang ajaran islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Departemen jaminan sosial, departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.<sup>67</sup>

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman ibn Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan *Baitul Mal*. Dalam hal ini, Ibn Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri, seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan “ Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya”. Ia memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari *baitul mal* sambil berkata “Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari *baitul mal*

---

<sup>67</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), h. 92

sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku”, itulah sebab rakyat memprotesnya.<sup>68</sup>

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thali, kondisi *Baitul Mal* ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima bantuan dari *Baitul Mal*. Selama masa pemerintahannya *Khalifah* Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak hasil hutan dan sayuran. Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib sistem administrasi *Baitul Mal* baik ditingkat pusat maupun daerah telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduanya berjalan lancar maka pendapatan *Baitul Mal* mengalami surplus. Dalam pendistribusian *Baitul Mal*, *Khalifah* Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam.

*Khalifah* Ali bin Abi Thalib tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam *Baitul Mal* maka harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada dana sedikitpun tersisa. Didistribusikan dilakukan sekali dalam sepekan yakni pada hari kamis merupakan hari pendistribusiannya atau hari pembayaran. Pada hari ini, semua perhitungan diselesaikan dan, pada hari sabtu, penghitungan baru dimulai. Ali bin Abi Thalib juga mendapat santunan dari *Baitul Mal* yaitu

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 93



mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai dengan separuh kakinya, dan sering bajunya penuh tambalan.<sup>69</sup>

Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin abu Sufyan (*Khalifah* pertama Bani Umayyah), orang-orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan agar mengambil dana dari *Baitul Mal* sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata “Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezhaliman. Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari terbit dan selama masih ada bintang di langit”.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis, hingga saat ini, telah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas mengenai Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan pada objek bahasan ini.

Rini Wulandari, 2008. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, “Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Kajian Ketatanegaraan Islam”. Peneliti ini lebih fokus kepada persamaan dan perbedaan tugas dan wewenang antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan *Wilayah Mazhalim*.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 94

Rini Rahmalia Koto, 2018. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, “Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2017”. Dalam penelitian ini peneliti fokus kepada proses-proses yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kabupaten Bantul pada tahun Anggran 2016-2017. Rini Rahmalia Koto juga menjelaskan hasil temuan BPK Perwakilan DIY terhadap Kabupaten Bantul.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir, Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.
- Abu Bakr, Sayyid. *I'ana'ututh thalibin*, (Semarang: Toha Putra 2000), jilid-4
- Agus Marimin, “ Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 14, No. 02 (Januari 2014)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- A.M. Ari Wahyudi, “KEWAJIBAN MENGUBAH KEMUNGKARAN” (On-Line), tersedia [dimuslim.or.id/158-kewajiban-mengubah-kemungkaran.html](http://dimuslim.or.id/158-kewajiban-mengubah-kemungkaran.html) (04 Desember 2019),
- Andriani, Durri, *Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017)
- Anis Marsela, “Kebijakan terhadap pengawasan harta Baitul Mal di Masa Khalifah Umar Bin Khatab”. (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011)
- Al-Gharyani, Al-Shadiq Abdurrahman. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 2004)
- Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi : Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif maqasid al-Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2016)
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011)
- Bahagia, “*Risywah* Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1 (Desember 2013)
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *SISTEM EKONOMI ISLAM : Prinsip Dasar(Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: KENCANA, 2012)

- Danil, Elwi, *KORUPSI, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Ghani, Abdul, *Hukum Suap & Hadiah*, (Jakarta Selatan: Cendikia Sentra Muslim, 2003)
- H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-2004-2018-104-kepala-daerah-tersandung-korupsi-paling-banyak-di-jawa-timur.html>
- Imam, Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Ilfan Muhammad Ilfana Ro'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Al-Khattab* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)
- Irfan, Nurul, *Gratifikasi dan kriminalitas seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014)
- , *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014)
- , *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Muhsin, Abdullah Bin Ab. *Suap Dalam Pandangan Islam*, trjmh. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), h. 9
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia , 2012)
- M.A Sabzwari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 44
- Maman, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2012)
- Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2002)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)

- Mohammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Profil BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar ibn al-Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Saifudin, "Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia". *Az Zarka*, Vol 9 No. 2 (Desember 2017)
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta : Gema InsaniPress, 2003)
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sutan, Amrizal, *(Audit Forensik) Penggunaan dan Kopetensi Auditor dalam Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Syamsul Anwar, 'Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam'. *JURNAL HUKUM*, Vol. 15 No. 1 (Januari 2008)
- Tim Penulis Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1980), h.720
- Tri Andarisman, *Hukum Pidana, Asas – Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Universitas Lampung, 2009).
- Undang- Undang Dasar 1945.
- Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi